

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang indeks inklusi ini berdasarkan pada kajian aspek budaya, aspek kebijakan, dan aspek praktik yang digunakan sebagai tolak ukur keterlaksanannya pendidikan inklusif yang ada pada setiap sekolah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010 sudah mencapai 79,92% dari yang diharapkan atau dalam kategori baik, secara terperinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indeks Budaya Inklusi

Indeks budaya inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inkusif telah mencapai skor 88,91% dari hasil yang diharapkan atau secara deskriptif berada pada kategori baik sekali. Namun dari 12 indikator yang ada, masih terdapat beberapa indikator-indikator pada budaya inklusi yang masih belum mencapai angka 100% atau belum dilaksanakan secara optimal seperti:

- a. Guru kelas dan guru pembimbing khusus belum terlibat dalam peninjauan kurikulum, pada umumnya guru kelas dalam menyesuaikan kurikulum masih dilakukan secara individu, sehingga

dalam pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan, belum sepenuhnya melihat berbagai karakteristik setiap siswa, guru masih mengabaikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum seperti: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. (2) beragam dan terpadu. Sehingga pada indikator ini mendapatkan 50 % dari yang di harapkan.

- b. Masih sering terdengar di dalam ruang kelas maupun di luar kelas tentang penggunaan *labeling* terhadap siswa dengan siswa, dalam hal ini masih sering terjadi di semua sekolah. Pada indikator ini memperoleh angka 72% dari yang diharapkan.
- c. Perkelahian siswa dengan siswa pernah terlihat sesekali saja yang sifatnya ringan, seperti saling memukul hanya karena permasalahan sepele, perilaku yang kasar, merebut barang milik temannya dengan paksaan. Pada indikator ini memperoleh angka 79% dari yang diharapkan.
- d. Siswa belum menghargai prestasi siswa lain, budaya menghargai dan santun terhadap semua siswa dalam interaksi dikelas maupun di luar kelas belum sepenuhnya di terapkan, bahkan situasi di kelas cenderung kompetitif. Pada indikator ini memperoleh angka 83% dari yang diharapkan.

- e. Sebagian besar lingkungan sekolah sudah terjaga dengan bersih dan rapi, meskipun demikian masih ada beberapa toilet khususnya untuk siswa yang terkesan belum terjaga kebersihannya. Pada indikator ini mendapatkan angka 94% dari yang diharapkan.
- f. Fasilitas sekolah pada umumnya sudah menyediakan fasilitas penunjang belajar yang memadai seperti, perpustakaan, ruang UKS, sarana olah raga, dan kantin sekolah, namun dalam hal ini fasilitas aula yang masih menggunakan ruang kelas yang berfungsi sebagai kelas dan juga aula, ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar di dalam kelas ketika pada waktu bersamaan menggunakan tempat tersebut. Pada indikator ini memperoleh angka 94% dari yang diharapkan.
- g. Dalam prestasi atau penilaian hasil belajar sudah sejalan dengan konsep penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, namun pada prakteknya masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan sistem penilaian yang fleksibel, yaitu hanya menggunakan sistim tes yang hasil datanya kuantitatif sehingga guru belum bisa melihat secara seksama tentang gambaran kemampuan siswa secara utuh. Pada indikator ini memperoleh angka 94% dari yang diharapkan.

2. Indeks Kebijakan Inklusi

Indeks kebijakan inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif telah mencapai skor 70,92% dari yang diharapkan, secara deskriptif dapat disimpulkan berada pada kategori baik, pelaksanaan kebijakan inklusi ini merupakan terendah dibandingkan pencapaian angka budaya inklusi dan praktik inklusi. Namun berdasarkan pada kajian hasil penelitian yang terdiri dari 9 indikator kebijakan inklusi masih ada beberapa indikator-indikator yang belum mencapai angka 100% atau masih belum dioptimalkan seperti:

- a. Sebagian besar sekolah dalam memberi dukungan pelajaran kekhususan yang merupakan ciri khas pembelajaran bagi ABK belum dioptimalkan seperti program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, BPBI (Bina Persepsi Bunyi dan Irama) untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tuna grahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tuna laras. Sehingga sekolah terkesan hanya menerima ABK untuk belajar bersama-sama siswa yang lain di sekolah reguler. Pada indikator ini memperoleh angka 16,5% dari yang diharapkan.
- b. Pelatihan guru dalam pembelajaran kolaboratif belum dilakukan secara menyeluruh, seperti pelatihan-pelatihan pembelajaran kolaboratif yang diadakan oleh unsur-unsur pemerintah masih belum menyetuh pada semua kalangan guru, selama ini pelatihan-pelatihan hanya ditujukan

kepada kepala sekolah dan kepada beberapa guru saja, sehingga berimbas pada pembelajaran di kelas yang sebagian besar masih menggunakan sistem pengajaran secara klasikal, belum menghargai dan membangun pengetahuan, pengalaman pribadi, bahasa, strategi, dan budaya yang membawa siswa pada situasi pembelajaran nyata. Pada indikator ini memperoleh angka 50% dari yang diharapkan.

- c. Hampir setiap sekolah masih ada keterbatasan dalam hal menyediakan sumber daya manusianya seperti keberadaan guru pembimbing khusus yang ada di sekolah belum diintensifkan, ini dikarenakan ada beberapa alasan diantaranya: (1) faktor geografis yaitu jarak antara sekolah sebagai pusat sumber yang mendukung ketersediaannya guru pembimbing khusus dengan sekolah reguler sangat berjauhan. (2) faktor kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran yang sebagian besar masih belum memahami pembelajaran dalam *setting* kelas inklusi. Pada indikator ini memperoleh angka 50% dari yang diharapkan.
- d. Dari beberapa sekolah hanya satu sekolah yang sudah mencantumkan karakteristik pendidikan inklusif ke dalam visi dan misinya. Demikian juga sebagian besar sekolah belum melibatkan unsur guru, karyawan dan masyarakat dalam menyusun visi dan misi sekolah, hal ini penting untuk semua pihak bertanggungjawab menjaga dan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam visi dan misi. Pada indikator ini memperoleh angka 55% dari yang diharapkan.

- e. Aksesibilitas atau lingkungan yang ramah bagi semua sudah terlihat pada sebagian besar sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, dan kondisidi dalam kelas seperti sirkulasi udara yang memandai, penyinaran yang cukup dan sebagainya, namun ada salah satu sekolah jalan menuju sekolah masih belum disesuaikan hal ini terjadi karena kondisi tanah yang becek dan belum rata sehingga agak menyulitkan siswa ketika mau masuk ke halaman sekolah. Pada indikator ini memperoleh angka 83% dari yang diharapkan.
- f. Rencana Pembelajaran belum dibuat secara maksimal hal ini hanya dibuat dalam mata pelajaran tertentu saja dan sebagian guru belum memperbaruhi dukumen rencana pembelajarannya. Pada indikator ini perolehan angka 94% dari yang diharapkan.

3. Indeks Praktik Inklusi

Indeks praktik inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif telah mencapai skor 79,95% dari angka yang diharapkan, secara deskriptif dapat disimpulkan berada pada kategori baik, namun berdasarkan pada 18 indikator yang telah diteliti terdapat indikator yang belum mencapai angka 100% atau belum dioptimalakan seperti:

- a. Kerjasama guru kelas dengan guru pembimbing khusus belum dilaksanakan secara optimal dalam mengajar dan memberi evaluasi di kelas, hal ini praktik pengajarannya di kelas masih melakukan sistem pengajaran secara individu, belum terlihat guru dikelas

bekerjasama dengan GPK, dalam kelas inklusi kerjasama guru dalam tim akan lebih efektif dalam melayani siswa yang memiliki keragaman dalam hambatan belajar dan kebutuhan. Pada indikator ini memperoleh angka 33% dari yang diharapkan.

- b. Materi kurikulum sebagian besar masih belum mencerminkan latar belakang siswa, dalam hal ini peserta didik belum mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, sesuai dengan potensi dan kondisi peserta didik. Selain itu juga sekolah masih berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang memacu pada penyelenggaraan Ujian Nasional, pada indikator ini memperoleh angka 50% dari yang diharapkan.
- c. Ketika ABK mengalami kesulitan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari anak-anak lain, kehadiran ABK di kelas masih dianggap aneh sehingga cenderung mengundang perhatian. Pada indikator ini memperoleh angka 50% dari yang diharapkan.
- d. Diskusi sesama guru belum dioptimalkan, meskipun sesungguhnya guru mendapatkan kesulitan dalam mengajar, hal ini dikarenakan minimnya sumber daya tenaga pendidik yang betul-betul memahami dalam pengembangan pendidikan inklusif, selain itu belum adanya forum diskusi secara resmi yang dibentuk oleh sekolah. Pada indikator ini memperoleh angka 50% dari yang diharapkan.

- e. Beberapa guru masih kurang menyadari upaya mental yang dilakukan beberapa siswa, hal ini dalam pembelajaran di kelas masih dijumpai penggunaan metode pengajaran yang kurang sesuai dengan peserta didik yang ada di kelas. seperti pengajaran terhadap ABK jenis tunarungu dan tuna grahita masih menggunakan pengajaran secara klasikal. Pada indikator ini memperoleh angka 66,5% dari yang diharapkan.
- f. Kerja sama antar sekolah masih sangat terbatas, hal ini kerja sama yang dilakukan hanya sebatas saling memberi informasi tentang keberadaan ABK dan mengadakan rapat-rapat tertentu. Pada indikator ini memperoleh angka 72% dari yang diharapkan.
- g. Dalam praktiknya dilapangan pengajaran menyesuaikan keaneka ragam kemampuan siswa masih belum dioptimalkan, dalam hal ini masih ada guru yang kurang optimal melakukan pengajaran yang berpusat pada anak, hal ini disebabkan diantaranya masih minimnya keterlibatan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan pembelajaran kolaboratif, pada indikator ini memperoleh angka 83% dari yang diharapkan.
- h. Lingkungan kelas, pajangan, dan sumber lainnya sebagian sudah membantu pembelajaran mandiri, namun masih ada beberapa sekolah yang belum menampilkan pajangan media pembelajaran dan

hasil karya siswa di dalam maupun diluar kelas. Pada indikator ini memperoleh angka 94% dari yang diharapkan.

- i. Instrumen penilaian untuk pengetahuan, ketrampilan dan sikap siswa masih belum dimaksimalkan hal ini ada beberapa guru yang masih sering menggunakan dalam bentuk tes dan penilaian tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada indikator ini memperoleh angka 94% dari yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil dari ketiga dimensi budaya, kebijakan, dan praktik maka Indeks Inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif yaitu mencapai skor 79,92% dari yang diharapkan, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada kategori baik. Mengacu hasil temuan pada penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk guru kelas dan untuk GPK

Pertama, peran guru kelas dan GPK sangat penting dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif guru dituntut memahami setiap siswanya sebagai individu yang memiliki keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, dalam hal ini

hendaknya guru kelas dan GPK diharapkan mewujudkan kerjasama dalam melayani siswanya dikelas, karena akan sangat sulit bagi guru dalam mengembangkan keahliannya bila dilakukan dengan sendirian.

Kedua, Diharapkan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar secara fleksibel, tidak berdasarkan standar pada umumnya sebagai tolak ukurnya tetapi dibandingkan individu itu sendiri, dalam proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus dan diharapkan guru memperoleh gambaran secara utuh kondisi belajar siswa yang sebenarnya, sehingga dapat mengadaptasi perencanaan dan pengajarannya selanjutnya menurut kebutuhan peserta didik.

2. Saran untuk Kepala Sekolah

Pertama, kepala sekolah sebagai *manager* dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolahnya, seperti dalam penyusunan kurikulum diharapkan kepala sekolah agar melibatkan secara aktif bersama-sama guru kelas dan GPK, karena mereka lebih mengetahui kompetensi, perkembangan, dan kebutuhan siswanya, sehingga perencanaan pengajaran dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dapat sepenuhnya mendukung keberadaan kelas inklusi.

Kedua, sebagai *leader* pendidikan yang profesional perlu mengacu pada beberapa kualitas tertentu, antara lain: mengetahui apa yang ingin dicapainya (visi) dan bagaimana mencapainya (misi). Dalam mewujudkan pendidikan inklusif diantaranya diawali dengan memiliki visi dan misi, oleh karena itu dalam merumuskan visi dan misinya, sekolah harus mencantumkan karakter pendidikan inklusif di dalamnya. Untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan

secara bersama-sama maka dalam merumuskan visi dan misi diharapkan melibatkan beberapa unsur seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan masyarakat setempat sehingga menjadi cita-cita bersama.

Ketiga, sebagai *educator*, hendaknya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam *setting* pendidikan inklusif seperti: mengadakan pelatihan-pelatihan dengan tutor sebaya di lingkungan sekolahnya masing-masing secara bertahap dan menyeluruh, membuat rencana kerja yang memberikan kesempatan untuk terciptanya diskusi-diskusi yang berhubungan dengan aktifitas pembelajaran kolaboratif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Saran untuk Dinas Pendidikan

Pertama, perlu menempatkan keberadaan guru mata pelajaran kekhususan pada setiap sekolah, guna memberi pelajaran yang sesuai dengan jenis kebutuhan siswa, seperti program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, BPBI (Bina Persepsi Bunyi dan Irama) untuk peserta didik tunarungu, Bina Diri untuk peserta didik tuna grahita, Bina Gerak untuk peserta didik tunadaksa, Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik tuna laras. Pelajaran kekhususan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Kedua, perlu menempatkan keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) pada setiap kelas yang ada ABK, sehingga sekolah tidak ketergantungan pada

kehadiran GPK dari SLB sebagai pusat sumber, mengingat tempat lokasi masing-masing sekolah yang sangat berjauhan.

Ketiga, memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti pembinaan profesi secara rutin, namun materi yang dikaji lebih diarahkan untuk mengenal anak berkebutuhan khusus, menyusun menangani aktifitas-aktifitas pembelajaran kolaboratif serta mengembangkan pembelajaran dalam *setting* pendidikan inklusif.

4. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih ada sisi kekurangan dan sisi kelemahan baik dilihat dari aspek metodologis maupun analisis. Kekurangan dan kelemahan dirasakan peneliti setelah adanya masukan dari berbagai pihak baik dalam kritik maupun saran, hal ini yang mendorong peneliti untuk berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan melakukan pengembangan permasalahan atau variabel-variabel yang dirasakan perlu untuk diteliti sehingga menghasilkan simpulan yang memiliki akurasi dan validitas yang lebih baik, serta menghasilkan temuan yang baru yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan inklusif yang sudah diimplementasikan di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.